

Membangun Perdamaian Pasca Konflik

Fitriani¹, Alphami Husaini²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan

alfahmihusaini@gmail.com²

ABSTRACT

After the peace agreement, Indonesia is now in the post-conflict era and many conflicts in various regions of Indonesia have decreased. Democratization and decentralization bring about improvements in social, economic and security conditions in society. This paper discusses post-conflict challenges in various regions of Indonesia. The main focus of this paper is approaches and strategies for post-conflict peacebuilding in order to build a foundation for peace to achieve consolidation of peace and sustainable development, economics, education and law. The third sector is the main focus of development in order to overcome the root of the conflict. As well as the establishment of institutions (FKUB), FKDM and FPK, as a responsive step by the government in detecting social conflicts in society. The success of all levels of post-conflict management is still dominated by the state, and this is the weakness of the post-conflict management being carried out, due to the dominance of state actors, with minimal involvement/involvement from civil society.

Keywords: *post conflict; peace building; sustainable development.*

ABSTRAK

Setelah perjanjian damai Indonesia kini berada di era pasca konflik dan banyak konflik di berbagai wilayah Indonesia menurun. Demokratisasi dan desentralisasi membawa perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan keamanan di masyarakat. Tulisan ini membahas tantangan pascakonflik di berbagai wilayah Indonesia. Fokus utama tulisan ini adalah pendekatan dan strategi pembangunan perdamaian pascakonflik dalam rangka membangun landasan perdamaian untuk mencapai konsolidasi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. ekonomi, pendidikan dan hukum. Ketiga sektor tersebut menjadi fokus utama pembangunan demi mengatasi akar konflik. Serta pembentukan lembaga (FKUB), FKDM dan FPK, sebagai langkah responsif pemerintah dalam mendeteksi konflik sosial di tengah masyarakat. Keberhasilan seluruh rangkaian manajemen pasca konflik masih dominan diperankan oleh negara, dan hal tersebut yang menjadi kelemahan dari manajemen pasca konflik yang dilakukan, karena dominasi aktor negara yang begitu kuat, dengan minimalnya melibatkan / pelibatan dari civil society.

Kata kunci : pasca konflik, pembangunan perdamaian, pembangunan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Indonesia kini memasuki masa pasca-konflik setelah konflik di daerah-daerah di Indonesia mereda baik karena telah dicapainya kesepakatan damai maupun karena sebab-sebab lain berlangsungnya demokratisasi dan desentralisasi yang membawa perbaikan pada kondisi sosial-ekonomi dan keamanan di masyarakat. Daerah-daerah yang dalam masa awal transisi demokrasi dilanda konflik, seperti Maluku, Maluku Utara, Poso, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan lainnya, dan dalam tingkat tertentu mengalami konflik jauh sebelum berlangsung transisi demokrasi sebagai warisan konflik di masa lalu, seperti Aceh dan Papua (dalam kasus Aceh perjanjian damai telah dicapai, sedangkan

dalam kasus Papua hingga kini masih mencari jalan keluar menemukan perdamaian), kini kondisinya berangsur¹-angsur membaik, telah memasuki era baru, menata kehidupan baru dalam politik, penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan, menuju pemulihan pasca-konflik dan berusaha mengejar ketertinggalan untuk mencapai kemajuan pembangunan.

Namun, di tengah situasi membaik itu pertanyaan muncul sehubungan dengan berbagai masalah dan tantangan masih dihadapi untuk menuju situasi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan ke depan setelah sekian lama dilanda konflik. Betulkah daerah-daerah pasca konflik ini telah menemukan kehidupannya yang baru? Apakah masalah-masalah menjadi sumber konflik dan dampak konflik dimasa lalu telah betul-betul teratasi? Kemana arah dari perkembangan terkini di daerah-daerah pasca konflik? Apakah betul-betul menuju konsolidasi perdamaian dan demokrasi ataukah masih menghadapi masalah-masalah yang mengancam daerah ini sehingga konflik bisa kembali terjadi?

Pertanyaan-pertanyaan ini penting diajukan disini untuk memastikan bahwa memang pemulihan pasca-konflik berlangsung dan pembangunan perdamaian tumbuh berkembang di daerah-daerah ini. Memasuki masa pasca-konflik sesungguhnya daerah-daerah pascakonflik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan perdamaian bersumber bukan hanya dari belum teratasinya masalahmasalah konflik di masa lalu tetapi juga masih rentannya kondisi perdamaian disebabkan belum efektif dan majunya pembangunan perdamaian karena masih lemahnya kelembagaan sosial-politik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam mengatasi berbagai potensi konflik terpendam, ketegangan struktural dan berbagai hambatan perdamaian dihadapi masyarakat pasca-konflik.

Membangun kembali masyarakat pasca-konflik membutuhkan pendekatan dan strategi pembangunan perdamaian pasca-konflik secara khusus, bukan hanya untuk mencegah agar konflik tidak kembali muncul ke permukaan tetapi juga untuk mengkonsolidasikan perdamaian menuju tercapainya pembangunan dan perdamaian berkelanjutan. Demikian itu selain membutuhkan pemahaman yang baik atas konflik dan karakteristiknya di masa lalu sehingga bisa diantisipasi segala kemungkinan terjadinya konflik di masa yang akan datang, juga penting untuk memastikan pembangunan perdamaian semakin tumbuh berkembang di masyarakat. Penguatan fondasi perdamaian dalam kaitan kebijakan pembangunan dengan perdamaian dan demokrasi, baik dalam prinsip-prinsip maupun mekanismenya, dalam hal ini penting untuk diperkuat bagi terselenggaranya pemerintahan efektif untuk mendorong transformasi konflik dan perdamaian jangka panjang di daerah-daerah ini.

Paper ini secara khusus ²membahas masalah-masalah dan tantangan dihadapi daerah-daerah pasca-konflik di Indonesia dan pendekatan dan strategi pembangunan perdamaian pasca-konflik diperlukan untuk mencapai konsolidasi perdamaian dan

¹ Lambang Trijono adalah staf pengajar pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia bisa dihubungi melalui email: trilambang@yahoo.com

² Tentang tantangan dan masalah dihadapi daerah pasca-konflik pada umumnya, lihat Jeroen de Zeeuw, 'Building Peace in War-Torn Society: From Concept to Strategy', NIIR, CCRU, Clingendael, August, 2001.

keberlanjutan pembangunan. Fokus utama pembahasan ditujukan pada pendekatan dan strategi diperlukan untuk pembangunan perdamaian pasca-konflik untuk mencegah agar konflik tidak kembali terjadi dan membangun fondasi perdamaian menuju tercapainya konsolidasi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pembuatan jurnal pada mata kuliah Resolusi Konflik dan Sosial ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan deskriptif.

Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif adalah memahami jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan temuan, di mana temuan tersebut tidak dapat dicapai dengan ukuran statistik atau cara kuantifikasi atau pengukuran lainnya. Jenis penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan sosial, sejarah dan perilaku. Menurut Sevilla Observasi atau observasi dalam arti sederhana adalah suatu proses dimana peneliti melihat situasi penelitian. Untuk itu metode harus tepat digunakan dalam penelitian berupa observasi interaksi atau kondisi belajar mengajar, perilaku dan juga interaksi kelompok. Sedangkan deskriptif menurut Arikunto adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain yang telah disebutkan, dimana hasil penelitian diperoleh dari berbagai sumber baik jurnal maupun buku yang terkait dengan kepenulisan judul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah-Masalah Utama

Daerah-daerah pasca-konflik umumnya masih dalam kondisi perdamaian yang masih rentan (*peace vulnerabilities*) sehingga konflik mudah kembali muncul ke permukaan. Tantangan dihadapi terutama bersumber dari masih adanya kesenjangan perdamaian (*peace gaps*), yaitu kesenjangan antara tujuan perdamaian ideal diharapkan dan realisasi perdamaian nyata dicapai di masyarakat. Untuk memastikan pembangunan perdamaian³ berlangsung secara berkelanjutan, dengan itu maka penting untuk dilakukan upaya-upaya mengatasi dan mengisi kesenjangan perdamaian (*fullfilling the peace gaps*) ini, baik pada level kebijakan maupun dalam praktik pembangunan perdamaian di tingkat komunitas.

Kesenjangan perdamaian bisa terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa bersumber dari masalah-masalah lemahnya pencapaian perdamaian (*peace making*) atau kesepakatan damai (*peace accord / agreement*) dicapai. Bisa juga bersumber dari lemahnya kelembagaan dan implementasi pembangunan perdamaian berlangsung di masyarakat. Bisa juga bersumber dari beratnya dampak atau beban masalah dihadapi akibat konflik di masa lalu.

Tinjauan kembali atas substansi kesepakatan damai, masalah-masalah kelembagaan dan efektivitas implementasi kesepakatan damai di masyarakat dalam hal ini penting dilakukan. Dalam kasus Aceh, misalnya, memastikan sejauhmana hasil kesepakatan

³ Kofi Anan, *Prevention of Armed Conflict*, Report of the Secretary General, United Nation, New York, 2002.

perjanjian Helsinki diimplementasikan secara nyata di masyarakat penting dilakukan. Demikian pula melakukan tinjauan kembali atas capaian perjanjian Malino dan implementasinya dalam kasus Maluku, Maluku Utara, dan Poso-Sulawesi Selatan, dan capaian perdamaian melalui Otsus dan implementasi Otsus di masyarakat dalam kasus Papua. Sejauhmana secara substansial perjanjian damai dicapai mampu menjawab masalah konflik yang ada dan menumbuhkan perdamaian di masyarakat penting untuk dikaji guna memastikan tercapainya konsolidasi perdamaian dan keberlanjutan pembangunan di daerah pasca-konflik.

Sayangnya, kajian tentang masalah pencapaian perdamaian ini dan bagaimana implementasinya di masyarakat masih sangat minim kita temukan di Indonesia. Padahal kajian ini sangat penting untuk dijadikan acuan dalam merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan perdamaian pasca-konflik untuk memastikan konsolidasi perdamaian dan keberlangsungan pembangunan dicapai di daerah ini. Belajar dari pengalaman di berbagai negara, perjanjian damai seringkali gagal mencapai konsolidasi perdamaian, dan karena itu konflik mudah kembali terjadi. Hal itu terutama disebabkan kurangnya konsensus nilai dari pencapaian perdamaian atau perjanjian damai dicapai dan lemahnya kelembagaan yang ada, baik pemerintah maupun masyarakat sipil, dalam mengimplementasikan perjanjian damai. Selain itu, kuat tertanamnya sejarah dan siklus konflik kekerasan di masa lalu, dan besarnya dampak kekerasan dan masalah-masalah ketidakadilan dan kesenjangan sosialekonomi dihadapi masyarakat pasca-konflik, ikut menambah bobot masalah ini.

Perjanjian damai secara substantif dikatakan⁴ kuat apabila ditopang oleh konsensus nilai yang luas (*broad based concensus*), melibatkan berbagai pihak sehingga mempunyai basis legitimasi politik yang kuat, dan karena itu berbagai pihak merasa memiliki dan berkomitmen mendukungnya. Dukungan kelompok-kelompok politik dominan, disertai koalisi dan pembagian kekuasaan diantara mereka, dan dukungan mayoritas penduduk atau konstituen perdamaian terhadap perjanjian damai sangat menentukan keberlanjutan pembangunan perdamaian. Demikian itu akan memastikan berlangsungnya pemecahan atas masalah-masalah konflik dan dampak konflik di masa lalu, pemulihan, reintegrasi, stabilisasi komunitas, rekonsiliasi, pemenuhan keadilan transisional, dan perbaikan sosial-ekonomi, sebagai tantangan dan masalah utama harus dipecahkan oleh pembangunan perdamaian pasca-konflik.

Namun, meski perjanjian damai secara substantif kuat, perdamaian tidak akan terwujud bila secara prosedural tidak disertai pendekatan dan kerangka kerja pembangunan perdamaian memadai sehingga bisa memastikan perjanjian damai berjalan dalam realitas kehidupan nyata. Masalah utama dalam implementasi perjanjian damai antara lain terdapat pada lemahnya kelembagaan, ketidakpercayaan berbagai pihak terhadap perdamaian, banyaknya pengganggu atau spoiler yang tidak menginginkan perdamaian berlangsung, tidak adanya kepemimpinan memadai, lemahnya koalisi politik dan sipil mendukung perdamaian, dan hambatan-hambatan lain berkaitan dengan pembagian kekuasaan (*power sharing*) sesudah perjanjian dicapai dan lambat atau tidak efektifnya pemulihan sosial-ekonomi berlangsung di level komunitas. Demikian itu

⁴ Kristi Samuels, 'Post-Conflict Peace Building and Constitution-Making', *Chicago Journal of International Law*, Vol 6, No.2. 2006.

seringkali menimbulkan kesenjangan harapan, ekspektasi perdamaian dari perjanjian damai dicapai tidak sebanding dengan implementasi pembangunan perdamaian dijalankan.

Masih rentan atau belum terkonsolidasinya perdamaian ini sewaktu-waktu bisa menyebabkan konflik kembali muncul di masyarakat. Oleh karena itu, selain memastikan agar perjanjian damai berjalan efektif, upaya pencegahan konflik agar konflik kekerasan tidak kembali muncul menjadi agenda penting dalam masa pasca-konflik. Pencegahan konflik di masa pasca-konflik pada esensinya sama dengan memelihara perdamaian (*keeping the peace*). Upaya ini sangat penting dilakukan di daerah-daerah pasca-konflik mengingat kebanyakan daerah-daerah pasca-konflik di Indonesia, seperti Aceh, Maluku, dan Papua, dulunya adalah daerah konflik berlarut-larut dan berlangsung cukup lama (*protracted conflicts*) disertai dampak kekerasan. Sejarah dan siklus konflik kekerasan itu begitu tertanam dalam sejarah konflik di daerah-daerah di Indonesia. Karena itu, pencegahan konflik di daerah ini masih penting untuk terus menerus dilakukan, terutama ketika dihadapkan pada dinamika politik yang tinggi baik di pusat maupun di daerah.

Demokratisasi, dan juga desentralisasi, berkembang di daerah-daerah di Indonesia sekarang ini memang bisa meredakan konflik. Akan tetapi perubahan politik ini, di sisi lain, juga menciptakan perubahan-perubahan politik tersendiri, menciptakan peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan politik, membangkitkan kecemasan-kecemasan politik sekaligus menumbuhkan harapan-harapan politik baru di kalangan elit politik, yang bisa meningkatkan eskalasi konflik di masyarakat. Memahami dinamika konflik politik ini sangat penting terutama untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik berulang di masyarakat dan memastikan perdamaian terus berjalan. Kaitan perdamaian, demokrasi, dan kebijakan pembangunan dalam hal ini penting untuk diperkuat untuk konsolidasi perdamaian di daerah pasca-konflik.

Membangun Perdamaian Pasca Konflik

Pembangunan perdamaian pasca-konflik (*post-conflict peacebuilding*) boleh dikatakan merupakan topik baru dalam kajian dan pembahasan akademis. Topik ini memang telah banyak dibicarakan dalam agenda pembangunan global, tetapi masih sangat sedikit menjadi topik kajian dan bahasan kalangan akademis. Kalaupun kajian dan pembahasan dilakukan kebanyakan secara khusus belum terfokus pada kajian ini dan masih sangat luas berkaitan dengan pembangunan perdamaian dalam arti umum. Pembangunan perdamaian dalam arti ini umumnya hanya dimaknai sebagai upaya pembinaan damai atau penguatan nilai-nilai perdamaian melalui pendidikan perdamaian untuk membangun pondasi perdamaian di masyarakat.

Pembangunan perdamaian pasca-konflik merupakan subjek khusus dan perlu mendapat perhatian khusus pula. Pembangunan perdamaian pasca-konflik menghadapi masalah dan tantangan perdamaian khusus berupa kerentanan perdamaian dan hambatan perdamaian dihadapi daerah pasca-konflik. Selain membutuhkan pendekatan pencegahan konflik secara khusus, terutama untuk mencegah agar konflik tidak kembali terjadi (*recurring conflict*), juga diperlukan pendekatan penyelesaian dan transformasi konflik

⁵ Lambang Trijono, *Pembangunan sebagai Perdamaian, Rekonstruksi Indonesia Pasca-Konflik*, the Padii Institute dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007

melalui pembangunan perdamaian. Pencegahan konflik dalam masa pasca-konflik memiliki arti khusus sama dengan pemeliharaan perdamaian sehingga kedua pendekatan ini, pencegahan konflik (*conflict prevention*) dan pemeliharaan perdamaian (*peace keeping*), harus dipadukan dan dijalankan secara kontinum dalam pembangunan perdamaian pasca-konflik.

Demikian pula dalam kaitannya dengan tujuan penyelesaian dan transformasi konflik, pemaduan keduanya perlu dikembangkan dalam pembangunan perdamaian pasca-konflik. Bahkan, dalam situasi khusus ketika perjanjian damai gagal dijalankan dan masyarakat pasca-konflik kembali jatuh dalam konflik sekalipun, pendekatan penciptaan perdamaian (*peace making*) masih harus dipakai dan tidak bisa ditinggalkan. Dengan kata lain, semua pendekatan pembangunan perdamaian harus digunakan dalam pembangunan perdamaian pasca-konflik, terutama pendekatan yang mengarah kepada penyelesaian dan transformasi konflik menuju tercapainya perdamaian dan pembangunan jangka panjang.

Beberapa kebutuhan penting perlu diidentifikasi untuk pengembangan kerangka pendekatan dan strategi pembangunan perdamaian pasca-konflik ini. Kerentanan perdamaian pasca-konflik membutuhkan pendekatan jangka pendek pemulihan dan stabilitasi komunitas dan pembangunan perdamaian jangka panjang untuk mencapai konsolidasi perdamaian. Pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan demokratis agar supaya kelembagaan pascakonflik mampu secara efektif mengatasi masalah ini, terutama ketegangan ketegangan struktural (*structural tensions*) yang ada, sangat penting dilakukan. Penguatan kapasitas kelembagaan ini merupakan langkah strategis mengingat kapasitas kelembagaan pasca-konflik umumnya sangat lemah. Bahkan, di masa lalu seringkali menjadi bagian dari konflik, atau walaupun tidak terlibat dalam konflik mereka terkena dampak dari konflik, sehingga di masa pasca-konflik lembaga-lembaga yang ada harus dipulihkan dan juga menjadi sasaran target dari pembangunan perdamaian.

Mengharapkan pemulihan dari lembaga yang dalam dirinya sendiri masih harus dipulihkan ini merupakan persoalan paling pelik dihadapi dalam pembangunan perdamaian pasca-konflik. Bagian terpenting dari pemulihan kelembagaan pasca-konflik ini adalah, selain diperlukan pembentukan lembaga-lembaga baru demokratis untuk reintegrasi pasca-konflik, tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menjadikan lembaga-lembaga pasca-konflik yang sudah ada, baik lembaga negara maupun masyarakat sipil dan organisasi ekonomi dan sosial-kemasyarakatan lainnya, mengalami transformasi, atau mengalami metamorfosis, dalam dirinya menjadi lembaga pemangku pembangunan perdamaian. Semacam pembentukan atau pengembangan institusi negara atau masyarakat sipil baru (*state and nation building*) berorientasi pada pembangunan perdamaian dalam hal ini perlu dikembangkan.

Menjawab kebutuhan ini perlu dilakukan pembentukan konstitusi atau perundang-undangan untuk menopang pembangunan perdamaian (*constitution making for peacebuilding*). Pembentukan konstitusi ini merupakan cara strategis untuk membangun

⁶ International Peace Academy, 'Transforming War Economies: Challenges for Peacemaking and Peacebuilding', Report of the 27th Wison Park Conference in association with the International Peace Academy, Wiston House, Sussex, 27-29 October, 2003

fondasi bangunan politik yang baru di daerah pasca-konflik, khususnya untuk mengatasi masalah pembagian kekuasaan (power sharing) dan pembentukan koalisi politik.

Selain itu, pengarusutamaan (*mainstreaming*) pembangunan peka konflik dan promotif perdamaian perlu dilakukan sebagai bagian dari pengembangan kelembagaan pasca-konflik ini. Peka terhadap konflik disini dalam arti bahwa proses dan penentuan kebijakan pembangunan harus diorientasikan pada upaya pencegahan agar konflik tidak kembali terjadi atau perdamaian dan pembangunan berlangsung secara berkelanjutan dengan memasukkan analisis konflik dan perdamaian ke dalam kerangka kebijakan pembangunan. Penggunaan pendekatan ini bisa diharapkan akan menghasilkan prioritas kebijakan strategis dan agenda program pembangunan yang mampu mencegah konflik dan mendorong tercapainya konsolidasi perdamaian.

Dalam konteks pasca-konflik, prioritas kebijakan strategis dan agenda program pembangunan peka konflik dan promotif perdamaian sangat diperlukan untuk mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi, ketidakadilan, kemiskinan, pengangguran dan hambatan perdamaian lainnya yang mengancam proses pembangunan dan perdamaian. Sebagai bagian terpenting dari prioritas strategis kebijakan pembangunan peka konflik ini adalah kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk transformasi ekonomi dari ekonomi perang (*economy of war*) yang berlaku di masa konflik menuju ekonomi perdamaian (*economic of peace*) di masa pasca-konflik. Tidak berkembangnya transformasi ekonomi dan masih berlangsungnya rejim ekonomi perang di masa pasca-konflik akan menghambat proses pembangunan perdamaian.

Melengkapi kedua kebutuhan strategis di atas, pengembangan kelembagaan demokratis dan tata kelola pembangunan perdamaian pasca-konflik merupakan kebutuhan strategis perlu dikembangkan di daerah pasca-konflik, terutama untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan negara dan masyarakat sipil dan lembaga pelayanan publik lainnya di tingkat lokal agar efektif memberikan pelayanan publik untuk mengatasi kerentanan-kerentanan dan hambatan perdamaian. Kebijakan dan pelayanan publik terutama diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah dihadapi kelompok-kelompok rentan, kelompok memiliki beban konflik di masa lalu, seperti eks-pelaku konflik, eks-terpenjara politik, maupun kelompok korban konflik, agar supaya terintegrasi ke dalam komunitas untuk kembali dalam kehidupan normal dalam arti menjalankan kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya secara mandiri di masyarakat.

Ketiga aspek kebutuhan pembangunan perdamaian pascakonflik di atas penting dijadikan acuan untuk menemukan kembali dan mengembangkan kelembagaan pembangunan perdamaian pasca-konflik. Pengembangan kelembagaan pembangunan perdamaian demokratis dan genuine di tingkat lokal membutuhkan pondasi nilai-nilai perdamaian, pembangunan dan demokrasi, agar supaya mampu menghasilkan kegiatan-kegiatan pembangunan perdamaian pasca-konflik yang sensitif dan transformatif terhadap konflik, sekaligus mampu menumbuhkan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Sebuah model pendekatan dan kerangka kerja kelembagaan pembangunan perdamaian pasca-konflik dalam hal ini perlu dikembangkan untuk mengembangkan kelembagaan pembangunan perdamaian pasca-konflik yang demokratis dan genuine di tingkat lokal.

⁷ ibid

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan jurnal ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut membantu dan mendukung, khususnya kepada ibuk Fitriani, M.Ag selaku dosen mata kuliah Resolusi Konflik.

DAFTAR PUSTAKA

Anan, Kofi (2002). *Prevention of Armed Conflict, Report of the Secretary General*, United Nation, New York.

Askandar, Kamarulzaman and Ang Ming Chee, eds. (2005).

Building Peace in Aceh, Problems, Strategies, and Lessons from Sri Lanka and Northern Ireland, Forum Asia, SECSN, dan IDR Betham, David, (2001). Democracy and Human Rights. New York: PolityPress.

Building Peace in War-Torn Society: From Concept to Strategy, NIIR, CCRU, Clingendael, Agustus. Gali, Boutros-Boutros (1996). An Agenda for Peace. New York : UnitedNation.

Chulchain, Siobhan Ni (2005). 'The Peace Frameworks and Peace Accord: A Comparative Analysis of Northern Ireland', dalam Kamarulzaman Askandar and Ang Ming Chee (eds), *BuildingPeace in Aceh, Problems, Strategies, and Lessonsfrom Sri Lankaand Northern Ireland*, Forum Asia, SECSN, dan IDR.de Zeeuw, Jeroen (2001).

International Organization for Migration (IOM), 'Meta Analysis, Vulnerabilities, Stability, Displacement and Reintegration: Issues Facing the Peace Process in Aceh, Indonesia', IOM-OIM, August, 2008.

International Peace Academy, (2003). 'Transforming War Economies: Challenges for Peacemaking and Peace building,' Report of the 27th Wison Park Conference in association with the InternationalPeace Academy, Wiston House, Sussex, 27-29 Oktober.

Knox, Colin and Padraic Quirk, (2000). *Peace Building in Northern Ireland, Israel and South Africa*, New York: MacMillan Press.

Korten, David C. (2002). *Kehidupan Setelah Kapitalisme*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Krummenacher, Heinz and Susanne Schmeidi, (2001). 'Practical Challenges in Predicting Violent Conflict FAST: A Comprehensive Early-Warning Methodology', Berne, October.